



KONSELING MULTIKULTURAL DI ABAD-21

Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd.,Kons

Profesor Bimbingan dan Konseling UNNES

Presiden Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia

email: mungin_eddy@yahoo.com ; mungineddy@mail.unnes.ac.id

Abstract

The multicultural counseling movement is a revolutionary force that has clearly become the center of attention in the counseling profession. Multicultural counseling and therapy have continued to develop over the past year due to the complex and rapid changes in society around the world. Multiculturalism blows very hard along with the wave of globalization that swept the world in the 21st century. The Wave of globalization that is spurred by information technology has even given birth, not only the world culture but also cybrculture. Society and the nation of Indonesia is part of global life that is inseparable from the wave of social and cultural changes that occur, namely the process of democratization which includes human rights, the rapid development of science and technology, especially information technology, and the influence of global culture on culture local, national culture of Indonesia. Indonesian society is multicultural so it should be a multicultural ground in the world of counseling in Indonesia counseling. Therefore, multicultural insight is a challenge and demand for future counselors in the 21st-century. Multiculturalism is the recognition of cultural pluralism that needs to be preserved as a treasure of humanity's cultural wealth. Because there is recognition, the diverse cultures live parallel in harmony and tolerance. 21st-century professional counselors in conducting multicultural counseling are important to understand the effects of cultural values, beliefs, behaviors, and other matters on clients from different cultural backgrounds in an effort to build relationships and understand each other. Counselors should seek cultural competence so that counselors will be able to form strong working relationships with clients so as to obtain good counseling results. Multicultural competence can be defined as the extent to which a counselor is actively involved in the process of self-awareness, gain knowledge, and apply skills in working with diverse individuals. In the age of diversity and globalization, the development of cultural competence becomes important as a set of successful adaptive skills within a person's environment. An effective counselor is indispensable in a multicultural society in the 21st-century because there will be a competition between professions to win public confidence. The 21st-century perspective on school counseling is at the core of a new vision of the counseling profession. Advocacy is an action to empower individuals or groups through actions that enhance self-efficacy, remove barriers to services needed, and encourage systemic change. The effectiveness of a counselor is not only enough to master concepts, theories, and counseling techniques, but the basic is the quality of personality with "wisdom". Wisdom is needed by counselors, especially in multicultural counseling in an effort to create an intimate relationship with clients.

Keywords: 21st-Century, Multicultural Awareness, Multicultural Competence, Multicultural Counseling Practice

PENGANTAR

Gerakan konseling multikultural merupakan kekuatan revolusioner yang telah jelas menjadi pusat perhatian dalam profesi konseling. Kekuatan ini menempa perubahan paradigma di dalam konstruksi bias budaya dari konsep-konsep fundamental seperti kesehatan mental, kematangan psikologis, perkembangan manusia, gangguan psikologis, dan strategi bantuan yang sedang diperluas untuk memasukkan cara berpikir yang lebih hormat dan responsif secara budaya. (Cartwright, Daniels, & Zhang, 2008: 318). Erford (2015) menyebutkan bahwa semua konseling adalah konseling multikultural. Karena setiap klien yang datang ke sebuah sesi konseling membawa pandangan yang unik tentang dunia, yang dibentuk oleh beragam pengalaman kultural, etnis, dan agama lain, melalui ras, etnisitas, gender, orientasi seksual, status sosial, sosial, umur, dan spiritual. Pandangan tentang klien tersebut akan mempengaruhi reseptivitas seorang klien terhadap pendekatan teoretis tertentu dan teknik intervensi yang dihasilkannya.

Konseling dan terapi multikultural terus berkembang dalam tahun terakhir ini karena perubahan masyarakat yang kompleks dan cepat di seluruh dunia. Sumber perubahan sosial yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk kepentingan komersial.

2. Dilarang menggunakan atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini untuk tujuan komersial.



pertama adalah globalisasi dan meningkatnya frekuensi pertemuan interpersonal lintas budaya yang langsung dan tidak langsung difasilitasi oleh teknologi transportasi dan telekomunikasi mutakhir. Sumber perubahan kedua adalah gelombang migrasi di seluruh dunia. Dalam era keragaman dan globalisasi, pengembangan kompetensi budaya telah menjadi penting sebagai seperangkat keterampilan adaptif yang berhasil dalam lingkungan seseorang. Profesi konselor menjadi penting untuk pelatihan dalam kompetensi kesadaran multikultural. Kompetensi multikultural harus umum untuk semua bentuk konseling dan terapi dan mencakup kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan yang berkontribusi terhadap pengembangan "konseling berpusat pada budaya" (Pedersen, 1997). Saat ini, sifat multikultural masyarakat adalah ciri permanen dan budaya dunia semakin kompleks. Keragaman telah menjadi kata sehari-hari untuk mengkarakterisasi dunia yang kita jalani sekarang.

Multikulturalisme berhembus sangat keras seiring dengan gelombang globalisasi yang melanda dunia di abad ke-21. Gelombang globalisasi yang ikut dipacu oleh teknologi informasi bahkan telah melahirkan, bukan hanya budaya dunia tetapi juga budaya maya (*cyber culture*). Kemajuan teknologi informasi telah membentuk ruang *cyber* yang maha luas, suatu universe baru, yaitu universe (alam semesta) yang dibangun melalui computer dan jaringan komunikasi. Melalui dunia nyata yang semakin sempit serta dunia maya yang melahirkan berbagai jenis fantasi manusia, umat manusia dewasa ini bukan hanya mengenal budayanya sendiri tapi juga mengenal budaya-budaya lain di segala penjuru dunia. Multikulturalisme bukan sekedar pengenalan terhadap berbagai jenis budaya di dunia ini, tetapi juga telah merupakan tuntutan dari berbagai komunitas yang memiliki budaya-budaya tersebut.

Masyarakat dan bangsa Indonesia adalah bagian dari kehidupan global dan oleh sebab itu tidak terlepas dari gelombang perubahan sosial dan budaya yang terjadi, yaitu proses demokratisasi yang didalamnya termasuk hak asasi manusia, perkembangan yang sangat pesat dari ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, dan pengaruh budaya global terhadap budaya lokal, budaya nasional bangsa Indonesia. Benturan budaya sangat mungkin terjadi jika masyarakat Indonesia tidak menyadari dan memahami tentang keragaman budaya Indonesia dan pengaruh budaya global. Kehidupan masyarakat modern dengan perubahan yang begitu cepat juga membawanya pada rasa keterasingan, dan mungkin kegelisahan menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Keberadaan manusia modern ialah keberadaan di dalam suatu masyarakat yang penuh risiko, masyarakat yang berubah dengan cepat meminta manusia mengambil sikap, mengadakan pilihan yang tepat untuk hidupnya atau dia hanyut bersama-sama dengan perubahan tersebut.

Masyarakat Indonesia sekarang dalam pusaran era disruptif sosial dan budaya dan profesi bimbingan dan konseling berada di dalamnya dan harus mampu bersaing sekaligus menang dalam persaingan di era peradaban baru tersebut. Era peradaban baru terjadi disruptif sosial dan budaya menciptakan peluang sekaligus menjadi ancaman dan tantangan bagi profesi bimbingan dan konseling sebagai profesi bantuan yang berkaitan dengan perkembangan dan kehidupan manusia sebagai fokus sasaran layanan profesi bimbingan dan konseling. Dalam peradaban di pusaran era disruptif social dan budaya, semua lawan menjadi tidak terlihat, tak kasat mata. Perubahan dalam peradaban era disruptif membuat petahana yaitu pola kehidupan social dan budaya lama pada masyarakat tradisional menjadi usang dan kehilangan relevansi dalam menghadapi dunia baru.

Disrupsi dalam era peradaban baru yaitu suatu era atau masa bermuncunya teknologi-inovasi interaksi sosial dan budaya yang cepat dan canggih, tidak terlihat, tidak disadari oleh masyarakat yang mapan sehingga mengganggu jalannya aktivitas tatanan sistem sosial dan budaya lama atau bahkan menghancurkan system sosial dan budaya lama tersebut yang terjadi pada masyarakat Indonesia harus dimaknai sebagai suatu tantangan, tetapi juga peluang bagi profesi bimbingan dan konseling. Era disruptif dalam era peradaban baru yang terjadi di abad ke-21 dimana disrupsi social dan budaya akan mempengaruhi profesi bantuan (*helping profession*) yaitu profesi bimbingan dan konseling. Tantangan dan sekaligus peluang bagi profesi bimbingan dan konseling dalam disrupsi di dalam semua segi kehidupan manusia dewasa ini terutama disebabkan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Profesi bimbingan dan konseling harus mampu



menghadapi tantangan dan memanfaatkan untuk menjadi peluang sehingga profesi bimbingan dan konseling akan menjadi eksis, kokoh dan dipercaya oleh masyarakat (*public trust*).

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berkembang, yaitu berada dalam masa transisi dari masyarakat tradisional menuju ke masyarakat modern. Masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh arus globalisasi dan perkembangan teknologi dan informasi, sehingga kemungkinan bertemunya orang-orang dari berbagai belahan dunia semakin besar pula. Pertemuan yang bukan hanya antar orang-perorang semata, melainkan sesungguhnya juga antar budaya dengan berbagai keragamannya.

Dengan demikian ciri khas (karakter) bangsa Indonesia yaitu berkarakter bangsa yang berkebhineka tunggal ika atau manusia antar budaya, bangsa yang majemuk sebagai ciri warga negara Indonesia yaitu:

1. Memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang tidak terbatas pada budaya tertentu.
 2. Dapat hidup dalam masyarakat majemuk yang memiliki keragaman budaya.
 3. Menghargai dan menghormati budaya yang beraneka ragam.
 4. Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 5. Mencintai sesama manusia, keluarga, masyarakat, bangsa dan tanah airnya.
 6. Menghormati sesama warga negara tanpa membedakan latar belakang sosial dan budayanya.
 7. Dapat hidup bersama dalam masyarakat majemuk yang berbeda budaya, etnik, agama, istiadat dan sebagainya.
 8. Toleransi keagamaan, menerima dan menghormati adanya beragam agama dan kepercayaan.
- Karena kebutuhan beragama ada pada setiap manusia dengan cara penyembahan yang berbeda.

Jika kita melihat kondisi Indonesia yang multikultural maka sudah selayaknya wawasan multikultural dibumikan dalam dunia konseling di Indonesia yang multikultural. Wawasan multikultural sangat penting, agar dapat memberikan pelayanan konseling secara efektif kepada semua sasaran layanan yang beranekaragam. Oleh karena itu, wawasan multikultural merupakan tantangan dan tuntutan bagi konselor masa depan di abad ke-21 ini harus menyadari bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragam budaya dan masyarakat berkembang yang berada dalam masa transisi dari masyarakat tradisional menuju ke masyarakat modern. Kompetensi multikultural bagi konselor masa depan di abad ke-21 harus dimiliki sehingga akan dapat menjalankan profesi konseling secara efektif sesuai dengan harapan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh klien dalam mewujudkan kehidupan yang efektif dan produktif dalam keseharian berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Asumsi mendasar yang mendasari praktik konseling multikultural abad ke-21 meliputi hal-hal berikut: (1) perkembangan dan perilaku manusia terjadi dalam konteks lingkungan yang memiliki potensi untuk dipelihara atau dibatasi; (2) bahkan dalam menghadapi tekanan yang menghancurkan, orang-orang yang diperlakukan dengan hormat dapat menunjukkan tingkat ketahanan dan sumber daya akses yang mengejutkan yang mungkin tidak dapat dilihat oleh seorang pemberi bantuan pesimis; (3) perhatian pada sifat multikultural dari pengembangan manusia adalah komponen utama dari konseling masyarakat; dan (4) pengembangan individu dan pengembangan masyarakat tidak dapat dipisahkan.

Asumsi-asumsi ini mengarah pada definisi peran konselor komunitas yang komprehensif dan multifaset. Konseling multikultural adalah kerangka bantuan yang komprehensif yang didasarkan pada kompetensi multikultural dan berorientasi pada keadilan sosial. Karena perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh konteks, konselor multikultural menggunakan strategi yang memfasilitasi pengembangan yang sehat baik dari klien mereka dan dari komunitas yang menyuburkan mereka.

Konselor profesional abad ke-21 harus mampu untuk menyelenggarakan konseling multikultural atau lintas budaya meliputi isu tentang penerapan dan implikasi teori-teori, pendekatan-pendekatan dan prinsip-prinsip konseling yang berasal dari suatu konteks budaya





tertentu ke dalam konteks budaya lain yang berbeda. Misalnya, penerapan pendekatan direktif, non-direktif, psikoanalitik, eksistensialisme, kognitivisme, rasional-emotif, behavioristik yang berasal dari negara barat ke dalam konteks budaya Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terjadinya globalisasi, meningkatnya mobilitas penduduk dari suatu tempat ke tempat lain, dan bertambahnya jumlah imigran dan pekerja dari suatu negara ke negara lain sangat erat kaitannya dengan konteks multikultural. Demikian juga dengan mudahnya akses orang terhadap jaringan internet melahirkan kecenderungan baru dalam konseling yang dikenal dengan *Cyber Counseling*, yang pada saat sekarang semakin populer. Komunikasi konselor dengan klien menggunakan email, bisa juga secara interaktif (*online*) dan melibatkan lebih dari dua orang. Proses konseling seperti ini sangat kental dengan isu-isu multikultural, dan sangat mungkin akan berkembang dalam pelaksanaan konseling di Indonesia.

KESADARAN DAN PEMAHAMAN MULTIKULTURAL

Pemahaman terhadap seluk-beluk budaya lokal dan sikap-sikap yang menyertai perbedaan antar-budaya, berkaitan dengan pergeseran hubungan antar-peradaban yang mempengaruhi pola-pola hubungan antar individu dan antar kelompok individu. Dalam hal ini, siapapun yang terlibat dalam kajian antar-budaya dituntut untuk memiliki perspektif global. Mungkin perspektif ini tidak langsung berkaitan dengan pemahaman konselor terhadap perilaku konseli, tetapi memberikan perspektif pada bagaimana seorang konselor dalam melakukan pelayanan konseling memosisikan dalam perkembangan global.

Multikultural adalah pengakuan terhadap pluralisme budaya yang perlu dipelihara sebagai kekayaan kebudayaan umat manusia. Karena ada pengakuan, maka kebudayaan yang beragam itu hidup sejajar dalam harmoni dan toleransi. Sekalipun selalu ada yang menjadi “budaya utama” atau budaya mayoritas yang menjadi *mainstream* dalam suatu komunitas, multikultural memastikan adanya hak hidup, pengakuan, dan bahkan pengertian, harmoni dan perdamaian; bukan konflik! Perspektif multikultural ini berbeda dengan “paradigma peradaban” yang dikemukakan oleh Huntington (2001) yang melihat masa depan akan diliputi oleh benturan antar peradaban. Benturan antar peradaban akan menyeret dunia pada berbagai konflik yang sama dahyatnya dengan Perang Dingin, dan peradaban Barat akan berusaha untuk menjadi kekuatan yang paling dominan di dunia melalui tema-tema propaganda yang disebutnya ‘universalitas peradaban Barat’ untuk menciptakan mono kulturalisme global (Huntington, 2001). Huntington yakin bahwa paradigma peradaban itulah yang paling mampu menjelaskan perkembangan masa depan. Sedemikian pentingnya, ia menyatakan bahwa kerjasama ekonomi dan kebudayaan sekalipun hanya bisa terjadi antara kebudayaan dalam rumpun peradaban yang serupa. Meskipun pada akhirnya ia juga menerima ide bahwa multikulturalisme global adalah sesuatu yang tidak dapat dicegah.

Pertemuan antar individu yang sekaligus antar karakter budaya, akibatnya adalah persoalan benturan budaya yang semakin mengemukakan dan menuntut perhatian. Persoalan yang tidak sekedar menuntut pemecahan melainkan lebih pada pemahaman dan kesadaran akan multikultural yang membawa pada kemampuan beradaptasi, menerima perbedaan, membangun hubungan yang baik dan mengatasi konflik yang berakar pada perbedaan budaya, serta memenangkan globalisasi.

Suatu bangsa dikenal kekhasan citranya berdasarkan “tanda-tanda pengenalan” tertentu. Ketika suatu bangsa, artinya suatu satuan sosial yang memiliki (atau ditandai oleh) satu kebudayaan, juga didukung oleh ciri-ciri rasial maka seringkali ciri-ciri itulah yang pada pandangan pertama seolah menandai jati dirinya. Namun, pada pandangan kedua akan segera terungkap bahwa “identitas” yang seolah-olah dinyatakan oleh ciri-ciri rasial itu sebenarnya menyesatkan. Begitu banyak bangsa “serumpun” dengan ciri-ciri fisik serupa ternyata mempunyai kebudayaan berbeda-beda. Kebudayaan inilah yang sebenarnya menandai identitas suatu bangsa.

Selanjutnya, kebudayaan itu dapat diperinci unsur-unsurnya, dan masing-masing unsur itu memainkan peranannya dalam memberikan identitas yang kuat pada bangsa atau suku bangsa yang memilikinya. Unsur pertama yang dapat menjadi tanda pengenalan yang mudah dibedakan antar





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengaitkan tanggung jawab kembali kepada Universitas Riau.

bangsa adalah bahasa, Adapun kepelikan yang lebih besar adalah dalam membedakan batas-batas antardialek atau antarvarian bahasa dalam suatu bangsa besar. Dalam urusan ini, kita bangsa Indonesia masih punya permasalahan yang memerlukan kajian lebih mendalam berkenaan dengan jumlah suku bangsa yang ada dalam tubuh bangsa Indonesia ini. Jika bahasa merupakan penanda utama dari suatu bangsa atau suku bangsa, mengapa kiranya bahwa jumlah suku bangsa Indonesia yang terdaftar dalam buku M.J Melalaton, Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia (1995), ada sekitar 500, tetapi dalam daftar “bahasa daerah” yang dihasilkan Pusat Bahasa ada lebih dari 700? Di sini tentu ada permasalahan di seputar kriteria pembedaan antara suku bangsa dan subsuku bangsa, dan pembedaan antara bahasa dan dialek.

Lepas dari perbedaan jumlah, yang jelas bahwa di Indonesia terdiri dari banyak bahasa dan dialek daerah yang perlu disadari oleh konselor dalam melakukan konseling di Indonesia. Banyak perilaku budaya yang terlibat relasi konseling dan mempengaruhi efektivitas konseling. Relasi konseling yang dilakukan antara konselor dan klien, fakta menunjukkan bahwa ekspresi budaya bukan hanya dinyatakan dalam bentuk komunikasi verbal, melainkan dalam bentuk komunikasi bahasa non-verbal. Dalam budaya yang tergolong “*high-context cultures*”, termasuk Indonesia dan negara Malaysia, Brunei Darusalam dan negara negara Timur lainnya umumnya, bahasa non-verbal jauh lebih penting daripada bahasa verbal.

Hubungan antar manusia berarti hubungan antara budaya dan komunikasi penting dipahami untuk memahami komunikasi antarbudaya, oleh karena melalui pengaruh budayalah orang-orang belajar berkomunikasi. Orang Bugis belajar berkomunikasi orang Sunda, orang Jawa, dan sebaliknya orang Sunda belajar berkomunikasi orang Bugis dan orang Jawa. Perilaku mereka dapat mengandung makna, sebab perilaku tersebut dipelajari dan diketahui; dan perilaku itu terkait dengan budaya. Orang-orang memandang dunia mereka melalui kategori-kategori, konsep-konsep, dan label-label yang dihasilkan budaya mereka.

Budaya dapat didefinisikan secara luas mencakup keyakinan umum kelompok, termasuk tradisi bersama, bahasa, gaya, nilai, dan kesepakatan tentang norma-norma untuk hidup. Budaya, bagaimanapun, juga memotong ras individu, kelas sosial, jenis kelamin, usia, status kemampuan, orientasi seksual, dan tradisi keluarga (Laird, 1998). Kecerdasan budaya terdiri dari kompetensi penting yang memungkinkan kita berinteraksi secara efektif dengan orang-orang dari beragam budaya dalam semua jenis pengaturan (Bucher, 2008). Sekolah yang kompeten secara budaya menghargai keragaman dalam teori dan praktik di semua aspek pengajaran dan pembelajaran sebagai bagian dari keseluruhan iklim sekolah (Klotz, 2006). Sekolah yang dianggap tanggap terhadap budaya membuat masyarakat keluar dari keragaman budaya, memiliki harapan akademis yang sama untuk setiap siswa, menyampaikan kurikulum yang mencerminkan banyak budaya, memberikan cara bagi siswa dan staf untuk menghadapi ketegangan ras / budaya, secara aktif mengeksplorasi beragam dan berkomitmen. staf pendidik, mempromosikan pengembangan staf secara terus menerus, melibatkan orang tua dalam proses pendidikan dan peka terhadap kebutuhan budaya mereka, dan mendefinisikan keragaman secara luas untuk mencakup orientasi seksual, kemampuan dan kecacatan disamping konsep tradisional tentang ras, agama, dan etnisitas (Lee, 2001).

Sejauh konselor dan klien membawa budaya pribadi mereka sendiri untuk konseling, setiap hubungan konseling dapat dianggap sebagai episode budaya. Konselor seharusnya tidak hanya mengungkapkan minat pada fakta-fakta tentang budaya klien tetapi juga bagaimana klien melihat budaya mereka. Konseling lintas budaya menyoroti episode budaya yang terjadi ketika aspek budaya konselor, budaya klien, dan situasi konseling bergabung. Dari dalam kombinasi ini muncul budaya pengalaman konseling yang baru dibuat, unik, dan dibagikan.

Banyak profesional konseling percaya bahwa memeriksa budaya klien sangat meningkatkan kualitas proses konseling. Tercakup dalam sudut pandang ini adalah sikap di antara beberapa profesional bahwa latar belakang konselor memengaruhi proses konseling dengan cara yang signifikan. Pandang melalui persepsi, harapan, pemahaman tentang gejala yang diungkapkan konselor,





pemahaman tentang potensi stresor, dan kesadaran akan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, agar dapat melayani klien secara efektif, konselor harus mempertimbangkan latar belakang budaya mereka sendiri, serta klien. Konselor harus melampaui kriteria referensi diri dan mempertimbangkan masalah dan masalah dalam konseling dari perspektif budaya klien. Sue, Arrendondo, dan McDavis (1992) mendefinisikan seorang konselor yang terampil secara budaya sebagai orang yang dalam proses menjadi sadar secara pribadi terhadap asumsi budaya, bias, stereotip, dan keterbatasan.

Aspek penting dari kesadaran diri untuk konselor adalah pengakuan bahwa mereka tidak dapat memasuki proses konseling atau nilai-nilai netral. Jika konselor masuk dengan salah satu dari dua asumsi ini, mereka menjalankan risiko memaksa klien untuk membuat keputusan atau berperilaku dengan cara yang konsisten dengan nilai-nilai (konselor) mereka sendiri daripada klien. Mereka juga menjalankan risiko membuat penilaian nilai tentang klien dan melihat klien sebagai benar atau salah, moral atau tidak bermoral, bukannya berbeda.

Nilai-nilai konselor juga memengaruhi sasaran konseling. Konselor yang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki tujuan akan secara tidak sengaja memaksakan tujuan (tidak diketahui) mereka pada klien. Karena konselor memang mengasumsikan beberapa tingkat otoritas dalam hubungan konselor-klien, karena konseling tidak bebas-nilai, dan karena nilai-nilai yang ditransmisikan adalah konselor yang dipelajari dalam latar belakang dan pelatihan mereka, klien mungkin ingin mengasumsikan nilai-nilai konselor atau setidaknya mengaitkan lebih banyak kepercayaan kepada mereka daripada dalam pengaturan non-konseling. Klien dapat menolak bantuan secara keseluruhan karena ketidaksesuaian antara sistem nilai konselor dan klien. Dalam banyak kasus, baik konselor maupun klien tidak akan bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan untuk konseling. Dengan demikian, hasil konselingnya lemah. Aksioma yang dinyatakan dengan baik berlaku di sini: Jika Anda tidak tahu ke mana Anda pergi, Anda akan berakhir di tempat lain. Tanggung jawab konselor termasuk mengetahui nilai-nilainya sendiri, mengetahui sasarannya untuk proses konseling, dan tidak memaksakan nilai dan sasaran tersebut pada klien. “Ini adalah tugas yang menuntut untuk melampaui nilai, bias, dan keyakinan yang membentuk konteks budaya kita jauh lebih sulit untuk mengenali, memiliki, dan memodifikasi akar budaya, kedalaman, dan pola yang membentuk perilaku bawah sadar dan otomatis” (Augsburger, 1986: 24).

Konselor multikultural yang efektif memiliki sikap dan keyakinan dan kesadaran akan latar belakang budayanya dan secara aktif berusaha untuk mendapatkan kesadaran lebih lanjut tentang bias, stereotip, dan nilai-nilainya sendiri. Meskipun konselor lintas budaya yang efektif mungkin tidak memiliki sistem kepercayaan yang sama dengan kliennya, dia dapat menerima pandangan budaya yang berbeda (Neukrug, E., 2012). Dengan kata lain, “Perbedaan tidak dipandang menyimpang” (Sue & Sue, 2008). Menjadi peka terhadap perbedaan dan menyesuaikan diri dengan latar budayanya sendiri memungkinkan konselor lintas budaya yang efektif untuk merujuk klien dari kelompok nondominan ke konselor budaya klien ketika rujukan akan memberi manfaat kepada klien. Sayangnya, contoh bagaimana profesional kesehatan mental telah mengecewakan klien yang berbeda secara budaya dari diri mereka sendiri karena bias dan prasangka mereka biasa terjadi (Sue & Sue, 2008).

Konselor multikultural yang efektif memiliki pengetahuan tentang kelompok tempat klien tinggal dan tidak sampai pada kesimpulan tentang cara-cara klien untuk berada. Selain itu, ia menunjukkan kemauan untuk mendapatkan pengetahuan mendalam tentang berbagai kelompok budaya. Konselor ini juga menyadari bagaimana isu-isu sosiopolitik seperti rasisme, seksisme, dan heteroseksisme dapat berdampak negatif terhadap klien. Selain itu, konselor ini tahu bagaimana faktor konseling yang berbeda membawa nilai-nilai yang mungkin merugikan beberapa klien dalam hubungan konseling. Konselor ini memahami bagaimana hambatan institusional dapat mempengaruhi kemauan klien dari kelompok nondominan untuk menggunakan layanan kesehatan mental. Sayangnya, kurangnya pengetahuan tentang kelompok budaya dapat menyebabkan konselor dan orang lain beralih ke kesimpulan yang salah (Ed Neukrug, 2012).





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk kepentingan komersial.

2. Dilarang menggunakan gambar, foto, atau video yang terdapat dalam karya tulis ini tanpa izin dari Universitas Riau.



Kesadaran diri hanyalah awal kesadaran multikultural dan kompetensi budaya. Menyadari diri konselor sebagai makhluk budaya telah digambarkan sebagai prasyarat untuk konseling multikultural yang kompeten. Kenyataannya, kompetensi multikultural pertama yang dibahas oleh Sue, Arredondo, & McDavis (1992: 482) menyatakan, "Peneliti budaya yang dicurigai berasal dari budaya yang tidak sadar akan sadar dan peka terhadap warisan budaya mereka sendiri dan untuk menilai dan menghargai perbedaan". Bila siswa menggunakan lensa budaya yang tidak tepat, moral sekolah dan nilai siswa kemungkinan besar akan terpengaruh secara negatif. Ini adalah tugas perasehat anak-anak dengan bantuan ahli bedah dan orang yang kurang ajar agar siswa berada di jalan lain untuk mengamati para pengelupasan mereka melalui berbagai batasan. Dengan mengenakan lensa yang berbeda, para siswa akan memiliki kesempatan untuk mengalami duniawi dan orang-orang yang berpaling dari orang-orang yang memiliki budaya yang berbeda, dan mereka kemungkinan besar akan menemukan sekolah dasar yang aman dan tidak sehat di lingkungan di mana populasi siswa yang beragam dapat hidup berdampingan secara damai

Konselor profesional abad ke-21 dalam melaksanakan konseling multikultural penting untuk memahami pengaruh nilai budaya, keyakinan, perilaku dan hal-hal lain terhadap klien dari latar belakang budaya yang berbeda dalam upaya membangun hubungan dan memahami satu sama lain (Gibson & Mitchel, 2010). Di sini klien tidak hanya dipahami dalam terminologi psikologis murni tapi juga dipahami sebagai anggota aktif dari sebuah budaya. Perasaan, pengalaman dan identitas dari klien dipandang dibentuk oleh lingkungan budaya. Ramirez (1991) berpendapat bahwa tema umum yang terdapat dalam semua konseling beragam budaya adalah tantangan untuk hidup dalam masyarakat beragam budaya. Dia menyatakan bahwa tujuan utama dalam menghadapi konseli dari berbagai kelompok etnis adalah mengembangkan "fleksibilitas kultural". Ramirez (1991) menekankan bahwa bahkan anggota kelompok kultur yang dominan atau mayoritas merasakan ketidaksesuaian antara siapa diri kita dan apa yang diharapkan orang lain dari kita. Pendekatan yang diambil oleh Ramirez (1991) menggunakan penyesuaian gaya dan pemahaman kultural konseli oleh konselor di pertemuan awal, kemudian mendorong untuk mencoba berbagai bentuk perilaku kultural. Jelas pendekatan ini menuntut fleksibilitas kultural dan kesadaran diri tingkat tinggi dalam diri konselor.

Di era globalisasi abad ke-21, kemungkinan bertemunya orang-orang dari berbagai belahan dunia semakin besar pula. Pertemuan yang bukan hanya antar orang-perorang semata, melainkan sesungguhnya juga antar budaya dengan berbagai keragamannya. Multikultural (keragaman budaya) merupakan aspek utama dari kehidupan manusia. Manusia berbeda dalam berbagai variabel yaitu variabel etnografik, variabel demografik dan variabel status. Variabel etnografik seperti etnisitas, kewarganegaraan, agama dan bahasa. Variabel demografik seperti umur, gender, tempat tinggal dan sebagainya. Variabel status seperti latar belakang sosial, ekonomi dan pendidikan dan afiliasi keanggotaan formal atau informal (Pedersen, 1990: 550, dalam Gladding, 2009).

Konseling di abad ke-21 harus memperhatikan pengaruh budaya terhadap konseling. Konselor yang kompeten secara multikultural menyadari bahwa teori yang digunakan dalam konseling untuk menjawab pertanyaan mengapa klien mencari konseling. Orr (2014) mengusulkan agar konselor secara konstan berusaha mengadaptasikan teori konseling untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan klien yang beragam, yang timbul dari pengaruh-mempengaruhi yang dinamis dan hampir selalu lebih besar dibanding perbedaan antara kelompok. Mengadaptasi teori dengan konteks masing-masing klien memungkinkan konselor untuk membongkai masalah klien dengan cara unik, yang menciptakan tantangan dan peluang baru untuk penerapan berbagai teknik untuk mengatasi masalah. Dengan cara ini konselor dapat memilah untuk tetap mendasarkan diri pada tradisi teoretis primernya sambil sekaligus mengintegrasikan berbagai teknik ke dalam pendekatan itu, yang membantu menciptakan pergerakan klien yang berasal dari latar belakang



budaya. Jadi, bagaimana seorang konselor kompeten secara multicultural mengadaptasikan sebuah teori agar cocok dengan pandangan seorang klien tentang dunia.

Di dalam proses konseling konselor maupun klien membawa serta karakteristik-karakteristik psikologinya, seperti kecerdasan, bakat, minat, sikap, motivasi, kehendak dan tendensi-tendensi kepribadian lainnya. Sejauh ini, di Indonesia banyak perhatian diberikan terhadap aspek-aspek psikologis tersebut (terutama pada pihak konseli) dan masih kurang perhatian diberikan terhadap latar belakang budaya konselor maupun klien yang ikut membentuk perilakunya dan menentukan efektivitas proses konseling (Bolton Brownlee, 1987). Misalnya, etnik, afiliasi kelompok, keyakinan, nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan, bahasa verbal maupun non verbal, dan tentu masuk bias-bias yang dibawa dari budayanya. Semakin banyak kesesuaian antara konselor dan klien dalam psikologis dan sosial budaya akan semakin besar kemungkinan konseling berjalan efektif dan demikian juga sebaliknya.

Implikasinya, konselor harus memahami dirinya sendiri, termasuk bias-bias budaya yang ada pada dirinya. Kemampuan konselor untuk memahami dirinya adalah titik awal kemampuannya untuk memahami dan membantu klien. Pemahaman konselor terhadap klien harus menyeluruh, meliputi atribut-atribut tersebut di atas. Hal ini berdasarkan pandangan dari perspektif budaya bahwa situasi konseling adalah sebuah “perjumpaan budaya” (*cultural encounter*) antara konselor dengan konseli. Sundberg (1986) melukiskan konseling sebagai “*a cultural solution to personal problem solving*”. Dalam konseling terjadi proses belajar, transferensi dan kaunter-transferensi, serta saling menilai. Pada keduanya juga terjadi saling menarik inferensi. Bukan hanya konselor yang menarik inferensi, melainkan juga sebaliknya. Dari segi konselor, ketepatan inferensi yang kemudian mendasari tindakannya dalam konseling tergantung pada kemampuan pemahaman secara utuh terhadap konseli. Dari segi konseli, ketepatan inferensi merujuk pada pola-pola perilaku yang dimiliki sebelumnya. Masalah timbul manakala ada inkongruensi antara persepsi dan nilai-nilai yang menjadi inferensi kedua belah pihak dan sumber terjadinya distorsi yang sangat besar adalah ketidakpekaan konselor terhadap latar belakang budaya konseli. Penguasaan konselor atas teori-teori dan teknik-teknik konseling yang standar saja tidak cukup untuk mencegah terjadinya distorsi dan mengatasi kecenderungan *orientasi pseudoetik* pada konselor

KONSELOR HARUS MEMILIKI KOMPETENSI MULTIKULTURAL

Terlepas dari profesi pelayanan manusia yang konselor tekuni, kompetensi itu penting. Kompetensi telah didefinisikan sebagai “penggunaan komunikasi, pengetahuan, keterampilan teknis, penalaran klinis, emosi, nilai, dan refleksi yang praktis dan bijaksana dalam praktik sehari-hari untuk keuntungan individu dan masyarakat yang dilayani” (Epstein & Hundert, 2002). Kompetensi “umumnya dipahami bahwa seorang profesional dapat dikualifikasikan, mampu, dan mampu memahami dan melakukan sesuatu dengan cara yang tepat dan efektif” (Rodolfa et al., 2005), sedangkan kompetensi profesional adalah penggunaan komunikasi, pengetahuan, keterampilan teknis, penalaran klinis, emosi, nilai, dan refleksi secara praktis dan bijaksana dalam praktik sehari-hari untuk keuntungan individu dan masyarakat yang dilayani (Epstein & Hundert, 2002). Kompetensi adalah kelompok ‘kompleks dan dinamis interaktif’ yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, kepercayaan dan nilai dan karakteristik penting lainnya (Rubin et al., 2007). Kompetensi memastikan bahwa “kompatibel secara profesional (yaitu, pengetahuan, keterampilan, dan nilai) untuk mempraktikkan profesinya dengan aman dan efektif” (Rodolfa et al., 2005).

Konselor seharusnya mengupayakan kompetensi kultural (Vasquez, 2010). Jika klien memersepsi konselornya kompeten secara kultural, mereka benar-benar lebih berkemungkinan untuk membentuk hubungan kerja yang kuat dengan konselor tersebut, sehingga mendapatkan hasil konseling yang baik (Owen, Tao, Leach & Rodolfa, 2011). Kompetensi kultural (*cultural competence*) merupakan salah satu kualitas kepribadian konselor efektif dalam menghadapi kelompok klien yang sangat beragam. Kompetensi multikultural menekankan pentingnya





kesadaran konselor akan reaksi emosional yang negatif yang mungkin konselor miliki dari kelompok yang berbeda dari konselor.

Kompetensi kultural adalah kemampuan untuk terlibat dalam tindakan atau menciptakan kondisi yang memaksimalkan perkembangan optimal sistem klien dan klien. Kompetensi konseling multikultural didefinisikan sebagai perolehan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan konselor yang dibutuhkan untuk berfungsi secara efektif dalam masyarakat demokratis yang pluralistik (kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi, bernegosiasi, dan melakukan intervensi atas nama klien dari berbagai latar belakang), dan pada tingkat organisasi / masyarakat, melakukan advokasi secara efektif untuk mengembangkan teori, praktik, kebijakan, dan struktur baru yang lebih responsif terhadap semua kelompok. (Sue, D.W. & Torino, 2005)

Pertama, definisi kompetensi kultural dalam profesi penolong ini memperjelas bahwa bentuk perlakuan obyektif konvensional dari satu tempat ke tujuan yang ditujukan untuk memperbaiki masalah yang ada mungkin bertentangan dengan pengalaman sosial politik dan budaya klien mereka. Seperti definisi yang lengkap, tidak hanya alamat klien (individu, keluarga, dan kelompok) tetapi juga sistem klien (institusi, kebijakan, dan praktik yang mungkin tidak sehat atau bermasalah bagi pembangunan yang sehat). Hal ini terutama terjadi jika ada masalah di luar dan pada di dalam klien. Misalnya, prasangka dan diskriminasi seperti rasisme, seksisme, dan homofobia dapat menghalangi fungsinya individu dan kelompok sehat dalam masyarakat kita.

Kedua, kompetensi kultural dapat dilihat sebagai berada dalam tiga hal utama: (a) komponen sikap / keyakinan - pemahaman tentang pengkondisian lingkungan seseorang yang mempengaruhi kepercayaan, nilai, dan sikap pribadi dari populasi yang beragam secara budaya; (b) komponen pengetahuan - pemahaman dan pengetahuan tentang pandangan dunia terhadap individu dan kelompok yang beragam secara budaya; dan (c) komponen keterampilan - kemampuan untuk menentukan dan menggunakan strategi intervensi yang sesuai dengan budaya saat bekerja dengan kelompok yang berbeda dalam masyarakat kita.

Ketiga, dalam arti luas, definisi ini diarahkan pada dua tingkat kompetensi kultural: orang / individu dan tingkat organisasi / sistem. Pekerjaan pada kompetensi budaya umumnya berfokus pada tingkat mikro, individu. Dalam pendidikan dan pelatihan konselor, misalnya, tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat kesadaran diri calon konselor (bias potensial, nilai, dan asumsi tentang perilaku manusia); untuk memperoleh pengetahuan tentang sejarah, budaya, dan pengalaman hidup dari berbagai kelompok minoritas; dan untuk membantu mengembangkan keterampilan interpersonal yang sesuai dengan budaya dan adaptif (pekerjaan klinis, manajemen, resolusi konflik, dll.). Kurang penekanan ditempatkan pada tingkat makro: profesi psikologi, organisasi, dan masyarakat pada umumnya (Sue, D.W., 2001). Disarankan bahwa tidak ada artinya melatih profesional yang berkompeten dengan kompeten ketika organisasi yang mempekerjakan mereka monokultural dan mencegah atau bahkan menghukum para konselor karena menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka yang kompeten. Jika profesi kita tertarik pada pengembangan kompetensi budaya, maka profesi itu harus terlibat dalam mempengaruhi tingkat sistemik dan sosial".

Selama beberapa dekade sejak diperkenalkannya profesi, kompetensi konseling multikultural telah terbukti berhasil dalam menyebarkan gagasan bahwa kompetensi konseling multikultural tidak mungkin. Dokumen kompetensi disusun di sekitar tiga bidang utama: (1) kesadaran konselor tentang nilai-nilai budaya dan bias sendiri, (2) kesadaran konselor tentang pandangan dunia klien, dan (3) strategi intervensi yang sesuai secara budaya. Dalam setiap bagian ini, kompetensi tercantum dalam kategori (a) sikap dan keyakinan, (b) pengetahuan, dan (c) keterampilan. Penting untuk dicatat bahwa bagian pertama menyoroti pentingnya kesadaran konselor terhadap nilai-nilai dan bias budayanya sendiri. Pencarian untuk kompetensi adalah proses berkelanjutan yang dimulai dengan interogasi diri dan tidak pernah berhenti.

Sue dan Sue (2002) memberikan definisi kompetensi kultural profesional bantuan: Pertama, profesional bantuan yang kompeten secara budaya adalah orang yang aktif dalam proses





menjadi sadar akan anggapannya sendiri tentang perilaku manusia, nilai-nilai, bias, prasangka

pengertian, keterbatasan pribadi, dan sebagainya. Kedua, seorang profesional bantuan yang kompeten secara budaya adalah orang yang secara aktif berusaha memahami pandangan dunia kliennya yang berbeda secara budaya. Ketiga, profesional bantuan yang kompeten secara budaya adalah orang yang sedang dalam proses untuk secara aktif mengembangkan dan mempraktekkan intervensi yang tepat, relevan, dan sensitif. strategi dan keterampilan dalam bekerja dengan klien budayanya yang berbeda.

Kompetensi multikultural dapat didefinisikan sebagai sejauh mana seorang konselor terlibat secara aktif dalam proses kesadaran diri, mendapatkan pengetahuan, dan menerapkan keterampilan dalam bekerja dengan individu yang beragam (Constantine, et al., 2007). Domain dalam model kompetensi konsultatif multikultural ini dapat dipikirkan dari sudut pandang tujuan atau proses yang benar (Collins & Pieterse, 2007). Perspektif sasaran tetap menunjukkan bahwa hasil kompetensi akhirnya dapat dilihat melalui perilaku yang dapat dibuktikan, sedangkan perspektif proses memerlukan keterlibatan dan perubahan internal. Dalam domain pengetahuan, kompetensi konseling multikultural dapat terdiri dari mendapatkan informasi tentang 'berbagai orientasi pandangan dunia, sejarah penindasan yang dialami oleh populasi terpinggirkan, dan nilai spesifik budaya yang memengaruhi pengalaman subjektif dan kolaboratif populasi terpinggirkan' (Constantine et al., 2007:24). Pengembangan keterampilan dan implementasi, dalam kompetensi konseling multikultural, mengharuskan konselor bertindak dengan cara yang "menarik dari dana pengetahuan budaya yang ada untuk merancang intervensi kesehatan mental yang relevan dengan populasi terpinggirkan" (Constantine et al., 2007:24). Dimensi proses atau domain kesadaran diri mengharuskan konselor yang kompeten secara multikultural 'sadar akan sikap, kepercayaan dan nilai seseorang mengenai ras, etnis, dan budaya seiring dengan kesadaran seseorang akan relevansi sosio-politik keanggotaan kelompok budaya dalam hal perbedaan budaya, diskriminasi, dan penindasan" (Constantine et al., 2007: 24).

Kompetensi kultural dimulai dengan mempelajari tentang budaya sendiri, bukan hanya fakta-fakta dasar seperti dari mana asal orangtua atau nenek moyang seseorang, tetapi juga nilai-nilai, asumsi dan bias yang telah dikembangkannya akibat semua pengaruh budaya (J.E. Harris, 2002). Ketika seorang konselor mencapai kesadaran diri kultural, artinya menjadi paham bahwa sudut pandangnya (seperti semua orang) unik dan istimewa maka beberapa kesimpulan telah dicapai (Fouad & Arredondo, 2007). Kesadaran diri kultural adalah penting, terlepas dari latar belakang konselor itu sendiri.

Mengenal budaya sendiri adalah langkah pertama yang baik, tetapi itu tidak akan cukup. Konselor tersebut juga memiliki informasi tentang kelompok budaya klien. Dengan kata lain, konselor tersebut seharusnya mengenal budaya klien. Upaya ini seharusnya dilakukan terus menerus, belajar melalui membaca, pengalaman langsung, hubungan dengan orang-orang di berbagai budaya dan sarana-sarana lainnya. Konselor seharusnya tidak berasumsi bahwa setiap individu bersifat khas berdasarkan kelompok kulturalnya. Dengan kata lain, meskipun sebuah kelompok budaya mungkin memiliki sebuah kecenderungan kolektif, para individu anggotanya mungkin sangat menyimpang dari kecenderungan itu. Mengasumsikan bahwa seorang anggota sebuah kelompok budaya akan memperlihatkan karakteristik yang lazim dalam kelompok itu, sama dengan berprasangka. Individu tersebut sebaiknya dilayani oleh seorang konselor yang menghargai norma-norma kelompok budaya tersebut dan juga menghargai heterogenitas yang melekat pada setiap budaya.

Setelah konselor mendapatkan pengetahuan kultural tentang dirinya sendiri dan klien, langkah berikutnya adalah mengembangkan strategi yang cocok untuk penilaian dan pengembangannya. Dengan kata lain, pendekatan-pendekatan dan teknik-teknik yang digunakan oleh konselor untuk memperbaiki kehidupan seorang klien seharusnya sesuai dengan nilai-nilai dan pengalaman hidup klien yang bersangkutan (Hall, et al., 2011).





Keragaman budaya masih akan terus bertambah pada abad ke-21 dan menjadikan konselor untuk peka dan mampu memberikan konseling secara efektif dan bermanfaat bagi klien yang membutuhkannya. Robinson (1977), menyatakan bahwa keragaman bukanlah sinonim dan multikulturalisme. Keberagaman menggambarkan klien-klien yang berbeda pada berbagai aspek seperti usia, gender, ras, agama, etnis, orientasi seksual, status kesehatan, kelas sosial, negara asal, wilayah geografis dan masih banyak lagi.

Sue (2001) telah menetapkan standar untuk memahami kompetensi konseling multikultural. Meskipun ada tantangan untuk mengkonstruksi ini (misalnya, Weinrach & Thomas, 2004), penelitian dan pengembangan kebijakan di wilayah ini didominasi oleh anggapan Sue bahwa kompetensi multikultural mencakup tiga dimensi berikut: (a) kesadaran, yaitu memahami bahwa faktor budaya seperti ras, gender, atau kelas memiliki dampak substansial pada pembangunan manusia dan proses konseling; (b) pengetahuan tentang cara-cara di mana pola-pola budaya memiliki dampak ini di berbagai kelompok; dan (c) keterampilan, yang mencakup kemampuan untuk secara efektif mengintegrasikan dampak faktor budaya ke dalam penyediaan tenaga profesional. Di bidang konseling profesional, ketiga dimensi yaitu kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan yang perlu dikembangkan oleh konselor sekolah profesional agar dianggap kompeten secara multibudaya.

Konselor yang efektif sangat diperlukan pada masyarakat multikultural di abad ke-21 karena akan terjadi persaingan antarprofesi untuk merebut kepercayaan masyarakat (*public trust*). Konselor yang efektif perlu kompeten secara budaya jika ia akan terhubung dengan kliennya. Meskipun beberapa berhak berpendapat bahwa semua konseling lintas budaya, ketika bekerja dengan klien yang berasal dari budaya yang berbeda dari satu sendiri, perpecahan sering terjadi. Oleh karena itu, kompetensi lintas-budaya adalah tema yang akan meninjau kembali seluruh teks ini dan menawarkan beberapa cara untuk mengurangi kesenjangan antara konselor dan klien.

Konselor multikultural yang efektif mampu menerapkan keterampilan wawancara dan konseling generik dan juga memiliki pengetahuan dan mampu menggunakan keterampilan dan intervensi khusus yang mungkin efektif dengan klien dari berbagai kelompok budaya. Konselor ini juga memiliki pengetahuan dan memahami bahasa verbal dan nonverbal klien dan dapat berkomunikasi secara efektif. Selain itu, penolong yang terampil secara budaya menghargai pentingnya memiliki perspektif sistemik, seperti pemahaman tentang dampak keluarga dan masyarakat terhadap klien; dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat, penyembuh rakyat, dan profesional lainnya; dan advokasi untuk klien bila diperlukan. Apa yang terjadi bila konselor tidak memiliki keterampilan yang sesuai saat bekerja dengan klien yang beragam secara kultural? Kemungkinan besar, klien akan keluar dari konseling lebih awal, merasa putus asa dan tidak puas dengan konseling, atau sedikit keberhasilan dalam konseling (Ed Neukrug, 2012).

Konselor memiliki tanggung jawab etis dan legal untuk menjadi kompeten (Corey, & Gelinas, 2011). Misalnya, ACA (2005) pedoman etika yang rumit dari delapan bidang kompetensi, termasuk (1) berlatih dalam batas seseorang dari kompetensi, (2) berlatih hanya di bawah pengawasan khusus seseorang, (3) menerima pekerjaan hanya untuk posisi (4) memantau efektivitas konseling, (5) mengetahui kapan harus berkonsultasi dengan orang lain, (6) menjaga saat ini dengan menghadiri terus kegiatan pendidikan, (7) menahan diri dari menawarkan jasa ketika secara emosional terganggu, dan (8) memastikan pemindahan yang tepat dari kasus ketika seseorang tidak mampu atau meninggalkan praktik (ACA 2005, Standard C.2). Sistem hukum memperkuat pedoman etika ini karena “salah satu fungsi dari tuntutan hukum adalah untuk mendorong terapi yang kompeten” (Swenson, 1997).

PRAKTIK KOSELING MULTIKULURAL DI ABAD KE-21

Pertanyaan penting yang harus diajukan saat konselor menentukan konseling multikultural. Apakah konselor memiliki kemampuan untuk memahami klien yang berasal dari budaya yang berbeda dari mereka sendiri? Adakah yang bisa benar-benar memahami pengalaman orang lain?





Mungkinah berhubungan dengan klien yang berasal dari budaya atau latar belakang etnis yang berbeda? Keterampilan tambahan apa yang harus dipelajari konselor jika dia bekerja secara efektif dengan klien dari kelompok non dominan? Bagaimana konselor menanggapi pertanyaan-pertanyaan ini, definisi konsultatif multikultural mereka akan bervariasi. McAuliffe (2008) menawarkan definisi konseling multikultural yang agak luas: “kesiapan yang konsisten untuk mengidentifikasi dimensi budaya kehidupan klien dan integrasi budaya berikutnya ke dalam pekerjaan konseling”. Sue dan Torino (2005) menawarkan sedikit lebih spesifik konseling dan terapi multikultural didefinisikan baik sebagai peran dan proses bantuan yang menggunakan modalitas dan strategi yang konsisten dengan pengalaman hidup dan nilai budaya klien, menggunakan strategi dan peran yang universal dan budaya, mengenali identitas klien kepada terasusuk dimensi individu, kelompok, universal, dan menyeimbangkan pentingnya individualisme dan kolektivisme dalam diagnosis dan pengobatan penilaian sistem klien dan klien.

Konseling multikultural adalah konseling yang melibatkan konselor dan klien yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, dan arena itu proses konseling sangat relevan dan terdinya bias-bias budaya dari pihak konselor yang mengakibatkan konseling tidak berjalan efektif (Dragun, 1986; Pederson, 1986). Agar berjalan efektif maka konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya dan melepaskan dari bias-bias budaya, mengerti dan dapat mengapresiasi diversitas budaya dan memiliki keterampilan-keterampilan yang responsif secara kultural. Di pandang dari perspektif budaya, situasi konseling adalah sebuah “perjumpaan budaya” (*cultural encounter*) antara konselor dengan klien yang dilayani.

Konseling multikultural berpijak pada pengakuan terhadap pluralisme budaya, ciri-cirinya dan dinamikanya yang mempengaruhi tafsir-tafsir budaya konselor dan dapat memfasilitasi atau justru menghambat proses konseling. Konselor merentas budaya harus sadar akan implikasi diversitas budaya terhadap proses konseling, akan dengan sungguh-sungguh memperhitungkan diversitas budaya tersebut beserta berbagai dinamika yang terjadi di dalam dan antara budaya-budaya yang beragam itu.

Keragaman dan multikulturalisme telah menjadi pusat profesi penolong di seluruh dunia. Banyak orang yang kita berinteraksi dengan profesional berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dari kita. Perspektif multikultural dalam konseling di Indonesia merupakan suatu yang harus diwujudkan karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural. Isu utama yang harus diperhatikan para konselor multikultural di Indonesia, terutama mereka yang memiliki sudut pandang emik, adalah dominannya teori-teori yang berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Konselor dalam bekerja dengan konseli yang berbeda budaya, konselor harus ingat beberapa pertimbangan umum ketika bekerja dengan kelompok budaya tertentu. Konselor penting sekali untuk selalu mengingatkan diri bahwa setiap individu, seperti halnya sesi konseling, adalah unik. Besar kemungkinan bahwa lebih banyak perbedaan dalam kelompok-kelompok daripada perbedaan antar-kelompok ketika mengkonseling orang dari budaya tertentu. Pengetahuan tentang tradisi budaya untuk dapat memberi layanan konseling yang efektif. Konselor harus berusaha mengenali klien, masalah dan diri mereka sendiri dengan seimbang.

Fokus yang paling menonjol dari multikulturalisme adalah keunikan dan konsep kelompok yang terpisah yang memfasilitasi perhatian pada perbedaan individual. Oleh karena itu, konseling multikultural dapat dilihat secara umum sebagai konseling dimana konselor dan konselinya berbeda. Perbedaan itu mungkin hasil dari sosialisasi lewat cara kultural yang unik, kejadian-kejadian hidup yang traumatis maupun yang menghasilkan perkembangan atau produk dari kebudayaan dalam lingkungan etnik tertentu. Kita menyadari bahwa hubungan antar budaya adalah suatu tantangan besar bagi manusia. Di dalamnya terdapat kepastian akan adanya perbedaan yang mungkin saja menyakitkan terutama ketika dihadapkan pada pengambilan keputusan, kepastian akan kemungkinan mengalami konflik, kepastian untuk mau bekerja keras belajar menerima perbedaan. Posisi lain tantangan tersebut sesungguhnya juga memberikan kesempatan besar bagi manusia untuk mengaktualisasikan potensi dan keunikan masing-masing. Kesempatan untuk menampilkan





warna masing-masing budaya dan membuat lebih indah taman dunia dengan bunga budaya yang beraneka ragam dan warna budaya.

Dalam kaitannya dengan profesi konseling, juga merupakan tantangan dan kesempatan bagi konselor untuk dapat memberikan pelayanan secara efektif dan bermartabat kepada konseli dengan keragaman budaya. Dengan demikian hubungan konseling tidaklah sederhana, sebab masing-masing konseli membawa latar belakang historis dan budaya khusus yang mempunyai implikasi kuat untuk hasil konseling itu. Oleh karena itu, pemahaman tentang konseling multikultural sangat diperlukan. Di dalam proses konseling konselor maupun konseli membawa serta karakteristik-karakteristik psikologinya, seperti kecerdasan, bakat, minat, sikap, motivasi, kehendak dan tendensi-tendensi kepribadian lainnya. Sejauh ini, di Indonesia banyak perhatian diberikan terhadap aspek-aspek psikologis tersebut (terutama pada pihak konseli), dan masih kurang perhatian diberikan terhadap latar belakang budaya konselor maupun konseli yang ikut membentuk perilakunya dan menentukan efektivitas proses konseling. Misalnya, etnik, afiliasi kelompok, keyakinan, nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan, bahasa verbal maupun non verbal, dan termasuk bias-bias yang dibawa dari budayanya. Semakin banyak kesesuaian antara konselor dan konseli dalam psikologis dan sosial budaya akan semakin besar kemungkinan konseling berjalan efektif dan demikian juga sebaliknya.

Keefektifan seorang konselor dan sebuah konseling ditentukan oleh (a) kepribadian dan latar belakang konselor; (b) pendidikan formal yang didapat oleh konselor; dan (c) kemampuan konselor untuk terlibat dalam kegiatan konseling profesional seperti melanjutkan pendidikan, supervisi, advokasi, dan membangun portofolio (Glading, 2009). Konselor dan proses konseling mempunyai efek yang dinamis terhadap orang lain; kalau tidak bermanfaat, kemungkinan besar justru memberikan dampak yang tidak diinginkan (Carkhuff, 1969; Ellis, 1984; Mays & Franks, 1980).

Konselor dalam menjalankan profesi konseling akan efektif bergantung pada banyak faktor. Salah satu faktor yang terpenting adalah hubungan antara konselor dan klien serta saling mengerti antara konselor dan klien. Hubungan konseling akan efektif dan lebih mudah tercapai jika konselor dan klien berasal dari budaya yang sama atau tidak asing dengan latar belakang masing-masing. Bagaimanapun juga sangatlah penting bagi seorang konselor untuk peka terhadap latar belakang klien dan kebutuhan khususnya. Jika tidak, konselor akan salah memahami dan membuat klien frustrasi, bahkan dapat menyakiti klien. Memahami dan menghadapi keberagaman dan perbedaan budaya dengan positif adalah masalah mengembangkan kesadaran diri dan mengembangkan kesadaran akan diri orang lain. Perbedaan antara konselor dengan klien jangan sampai berpengaruh negatif terhadap proses konseling.

Konseling yang kekhawatiran utamanya dipusatkan pada eksistensi individu sebagai manusia, berdasarkan pencapaian tujuannya melalui interaksi konselor dan individu yang kondusif. Interaksi tersebut haruslah diletakkan dalam konteks budaya Indonesia, sehingga pendekatan konselor terhadap klien dapat dipertanggungjawabkan. Disamping itu, pelayanan konseling yang bertujuan mengembangkan dan meningkatkan mutu kehidupan serta martabat manusia Indonesia harus berakar pada budaya Indonesia sendiri. Ini berarti bahwa penyelenggaraan konseling harus dilandasi oleh dan mempertimbangkan keragaman sosial budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia, disamping kesadaran akan dinamika sosial budaya itu menuju masyarakat yang lebih adil dan makmur (Wibowo, 2002:20). Klien-klien yang berlatar belakang sosial budaya yang berbhineka itu tidak dapat disamaratakan dalam memberikan pelayanan konseling. Meskipun bangsa Indonesia sedang menuju pada satu budaya kesatuan bangsa Indonesia, tetapi akar budaya asli yang sekarang masih hidup dan besar pengaruhnya terhadap masyarakat budaya asli patut dikenali, dihargai, dan dijadikan pertimbangan utama dalam pelayanan konseling. Masyarakat Indonesia bersifat multi-etnik, karena itu konselor menghadapi individu-individu dengan berbagai latar belakang budayanya, dan dengan berbagai kebutuhan dan masalahnya yang kemungkinan besar bermuatan budaya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan atau dimanfaatkan secara komersial.





Apakah konselor memiliki kemampuan untuk memahami klien yang berasal dari budaya yang berbeda dari mereka sendiri? Adakah yang pernah benar-benar memahami pengalaman orang lain? Apakah mungkin untuk terhubung dengan klien yang berasal dari latar belakang budaya atau etnis yang berbeda? Keterampilan tambahan apa yang harus dipelajari konselor jika dia bekerja secara efektif dengan klien dari kelompok yang tidak dominan? Ini adalah beberapa pertanyaan penting yang harus ditanyakan ketika mendefinisikan konseling multikultural. Dan, seperti yang konselor duga, berdasarkan pada bagaimana orang menanggapi pertanyaan-pertanyaan ini, definisi konseling multikultural mereka akan bervariasi. Misalnya, McAuliffe (2008:5) menawarkan definisi yang agak luas dari konseling multikultural: “kesiapan konsisten untuk mengidentifikasi dimensi budaya kehidupan klien dan integrasi budaya ke dalam kerja konseling.” Sue dan Torino (2005:6) menawarkan definisi yang lebih spesifik konseling dan terapi multikultural sebagai peran dan proses membantu yang menggunakan modalitas dan tujuan yang konsisten dengan pengalaman hidup dan nilai-nilai budaya klien, menggunakan strategi dan peran yang membantu budaya universal dan spesifik, mengenali identitas klien untuk memasukkan dimensi individu, kelompok, dan universal, dan menyeimbangkan pentingnya individualisme dan kolektivisme dalam diagnosis, penilaian dan pengobatan klien dan sistem klien.

Dalam era globalisasi ini, ada kebutuhan yang meningkat untuk melatih konselor dan terapis yang kompeten secara budaya untuk memberikan konseling dan terapi yang didukung dan didukung secara budaya baik di dalam maupun di luar negara asal mereka (Hall, 2006). Di zaman keragaman dan globalisasi, pengembangan kompetensi budaya menjadi penting sebagai seperangkat keterampilan adaptif yang sukses dalam lingkungan seseorang (Sternberg & Grigorenko, 2004; Sue, 1998). Pedersen (2002) telah lama mengingatkan profesi ini untuk pentingnya pelatihan dalam kompetensi kesadaran multikultural. Kompetensi multikultural harus generik untuk semua bentuk konseling dan terapi (American Psychological Association, 2003; Hays, 2001; Sue & Sue, 2003) dan mencakup kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan yang berkontribusi pada pengembangan "konseling yang berpusat pada budaya". Globalisasi dan diversifikasi memfasilitasi penyebaran informasi kepada mereka yang mendapat manfaat dari pengetahuan.

Tanggung jawab apa yang dimiliki konselor sekolah dalam mendorong iklim yang menghormati keragaman budaya? Konselor sekolah harus mengambil posisi kritis dalam masalah keadilan sosial, mengadvokasi kaum muda yang terpinggirkan, dan menjadi aktivis di sekolah dan komunitas yang terdiri dari keluarga miskin dan tradisional yang kurang terlayani. Perspektif abad ke-21 di bidang konseling di sekolah merupakan inti dari visi baru profesi konseling. Advokasi adalah tindakan untuk memberdayakan individu atau kelompok melalui tindakan yang meningkatkan self-efficacy, menghilangkan hambatan terhadap layanan yang dibutuhkan, dan mendorong perubahan sistemik. Konselor sekolah profesional bertindak sebagai pendukung bagi mereka yang terpinggirkan dengan bekerja dengan sistem untuk mengatasi ketidakadilan di sekolah (Holtcomb-McCoy, 2007). Konselor sekolah diharapkan "secara khusus menangani kebutuhan kelompok yang kurang terlayani atau berkinerja buruk lainnya" (ASCA, 2005:77). Konselor melakukan ini dengan memberikan konseling dan konsultasi yang kompeten dan melalui kolaborasi dengan semua pihak yang berkepentingan untuk menciptakan iklim sekolah yang menyambut dan menghargai keunikan dan karunia siswa yang beragam secara budaya (ASCA, 2009).

Salah satu dilema bahwa konselor sekolah dapat membantu memusatkan perhatian adalah bagaimana partisipasi dan penerimaan. Dengan mengidentifikasi praktik yang mungkin menghambat partisipasi dan akses, perlu mencari cara untuk memotivasi interaksi staf dan siswa yang melampaui garis etnis, budaya, dan ras (Banks, 2002). Ini jauh melampaui intervensi tepat waktu seperti "Hari Hak Asasi Manusia" dan acara multikultural. Jika dampaknya dibuat untuk





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang menyalin, mendistribusikan, dan memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa persetujuan Universitas Riau.

menciptakan lingkungan yang memberdayakan, menerima, dan menghormati, proses dan perencanaan harus :

-) multifaset (bervariasi dalam aktivitas dan layanan);
-) inklusi (melibatkan semua personil sekolah, semua siswa, dan melibatkan masyarakat);
-) perkembangan (proaktif, tidak bersifat reaktif);
-) terus menerus (sedang berlangsung); dan,
-) didukung di seluruh sistem sekolah (Johnson, 1995).

Kompetensi budaya adalah komponen integral iklim sekolah dan administrasi, sekolah, dan staf "mempromosikan inklusivitas dan tanggapan yang tepat terhadap perbedaan yang tercermin dari kebijakan, program, dan praktiknya" (Nelson, Bustamante, Wilson, & Onwuegbuzie, 2008: 208). Sebuah sekolah yang memiliki pandangan luas tentang keragaman budaya tidak hanya mencakup perbedaan ras dan latar belakang etnis, tetapi juga "orientasi seksual, tradisi keagamaan, kelompok usia dan perbedaan belajar yang beragam" dan "biasanya mengundang semua orang untuk belajar dan berubah". Sekolah yang kompeten secara budaya, yaitu:

-) mengakui keragaman siswanya dan mendorong rasa komunitas di sekitarnya;
-) memiliki standar akademik yang tinggi untuk semua siswa;
-) memiliki kurikulum yang mencerminkan banyak budaya;
-) memiliki mekanisme untuk menyelesaikan konflik rasial / budaya;
-) berkomitmen terhadap keragaman di antara stafnya; dan
-) menyediakan pengembangan staf untuk isu-isu yang berkaitan dengan budaya.

Konselor dapat menilai kompetensi budaya sekolahnya dengan cara berikut: (a) melakukan audit budaya, yang merupakan sarana komprehensif untuk menilai kompetensi budaya sekolah dengan mengidentifikasi area kekuatan dan kebutuhan untuk memandu perencanaan strategis. (b) mengumpulkan data dari berbagai sumber mengenai kebijakan, program, praktik, ritual, dan artefak organisasi yang mencerminkan perspektif beragam kelompok. (c) melakukan survei, wawancara, dan observasi lapangan (diadaptasi dari Nelson et al., 2008: 208-10).

Sebagai konselor sekolah, lensa kultural konselor akan memiliki dampak yang luar biasa pada persepsi awal konselor terhadap orang lain. Sepanjang tahun-tahun formatif konselor, dikondisikan untuk melihat melalui lensa yang disediakan oleh keluarga dan lingkungan konselor. Lensa budaya menyaring persepsi kita tentang orang lain. Kita saling melihat melalui saringan bias, prasangka, pendidikan, ras, agama, komunitas, jenis kelamin, dan etnis kita (Bucher, 2008). Karena persepsi ini, siswa membentuk geng dan geng dalam budaya mereka sendiri dan seringkali terjadi konflik. Memahami budaya kita sendiri dan budaya orang lain memberi kita gambaran yang lebih baik tentang diri kita dan orang lain. Karena sejarah kita merupakan bagian penting dari budaya kita, mendengarkan cerita-cerita yang berpindah dari generasi ke generasi ke dalam keluarga kita membantu kita mengembangkan orientasi pribadi. Keingintahuan batin memotivasi kita untuk mengetahui akar kita, asal asal kita, atau dari mana keluarga kita bermigrasi. Sewaktu kita mendengarkan cerita orang lain, kita mengembangkan kesadaran sosial. Seberapa banyak kita tahu tentang orang lain, terutama siswa dan keluarga yang baru saja bermigrasi dan pengalaman budayanya berbeda drastis dari kita?

Praktik konseling yang kompeten mengharuskan para konselor memahami kompleksitas budaya dan identitas kelompok ketika klien mereka mengalaminya. Tetap "tidak nyaman" dengan identitas apa pun bukanlah pilihan. Bahkan, konselor komunitas yang mendalami multikulturalisme mengambil langkah lebih jauh di luar pemahaman untuk bertindak. Ini adalah langkah singkat dari menyadari dampak lingkungan budaya untuk memperhatikan peran perantara dalam kehidupan klien kami. Begitu kita mulai melihat penindasan sistemik, itu hanya langkah pendek untuk menerima tanggung jawab kita untuk aksi sosial. (Lewis & Arnold, 1998: 51)

Ketika konselor berusaha menanggapi kebutuhan anggota masyarakat, terutama orang yang paling rentan, kebutuhan untuk menegosiasikan perubahan lingkungan menjadi jelas. Pekerjaan





mereka membawa para konselor berhadapan muka dengan para korban kemiskinan, rasisme, seksisme, dan stigmatisasi; dengan sistem politik, ekonomi, dan sosial yang membuat individu merasa tidak berdaya; dengan badan pengatur yang menolak tanggung jawab mereka untuk merespons; dengan norma-norma sosial yang mendorong isolasi. Dalam menghadapi kenyataan ini, konselor tidak punya pilihan selain untuk mempromosikan perubahan positif dalam sistem yang mempengaruhi kesejahteraan klien mereka.

Konseling multikultural tidak boleh dilihat sebagai terpisah dari struktur masyarakat dalam arti bahwa itu dapat dianggap hanya sebagai 'bantuan psikologis'. Ini adalah bagian yang sangat penting, tetapi itu tidak cukup. Sue et al. (1999:1064) mencatat bahwa "multikulturalisme tidak hanya tentang memahami perspektif dan pandangan dunia yang berbeda tetapi juga tentang keadilan sosial". Selama beberapa tahun terakhir, sejumlah artikel menarik telah dipublikasikan mengenai isu keadilan sosial, yang menyatakan bahwa konselor juga harus mengadvokasi dan memperhatikan dan juga menanggapi masalah sosial yang membutuhkan tindakan konkrit - menanggapi sering berarti menanggapi bersama dengan orang lain (lihat misalnya Arredondo & Perez 2003; Baluch, Pieterse & Bolden 2004; Vera & Speight 2003). Oleh karena itu, membangun jaringan kolaboratif dengan sejumlah kelompok profesional lainnya dan dengan anggota komunitas klien adalah hal yang penting.

Sistem jaringan kolaboratif bervariasi di berbagai negara, tetapi berguna untuk mengambil contoh yang dapat memberikan ide untuk pengembangan. Sebuah studi tindak lanjut Finlandia yang menarik, yang didasarkan pada data nasional yang luas, menunjukkan bahwa konselor sekolah telah berusaha untuk menanggapi tantangan integrasi imigran dengan membangun jaringan kolaborasi interprofesional di dalam dan di luar sekolah. Jaringan ini termasuk guru, otoritas lokal dalam perawatan sosial dan kesehatan dan administrasi tenaga kerja, perwakilan dalam organisasi etnis minoritas serta personel sumber daya manusia di perusahaan lokal. Ada juga pengembangan dalam kerja sama dengan administrasi tenaga kerja dan industri dan perdagangan lokal. Analisis data penelitian menunjukkan bahwa ada dua pendekatan yang berbeda untuk interaksi interprofesional. Satu pendekatan memiliki beberapa kesamaan dengan model panduan holistik yang berpusat pada siswa Eropa (Van Esbroeck & Watts 1998). Titik awal dari model holistik adalah kebutuhan siswa, yang memerlukan integrasi keahlian guru, konselor sekolah dan profesional lain di luar sekolah. Selain memberikan dukungan dan saran untuk imigran, konselor sekolah bertindak sebagai pengamat masalah di luar keahlian mereka sendiri (misalnya jaminan sosial dan masalah kesehatan mental), dan, jika perlu, berkonsultasi dengan para ahli.

Hanna et al. (1999) menyatakan bahwa dalam kecenderungan dewasa ini keefektifan seorang konselor tidak hanya cukup dengan menguasai konsep, teori, dan teknik konseling, akan tetapi yang mendasar adalah kualitas kepribadian dengan "kearifan". Kearifan sangat diperlukan oleh para konselor terutama dalam konseling multicultural dalam upaya menciptakan suasana hubungan yang akrab dengan klien. Konselor multicultural yang arif memiliki karakteristik sebagai berikut: (a) sangat empatik dan merasa iba yang besar, (b) menggunakan pendekatan atau keterampilan yang bersifat otomatis, (c) memiliki tilikan secara mendalam, (d) tidak mudah tergelabui dan menipu, (e) memiliki pengetahuan diri dan kesadaran diri secara ekstensif, (f) belajar dari kesalahan-kesalahan, (g) siap melakukan penataan ulang konteks kultural, (h) mengetahui rentangan strategi mengatasi masalah, (i) dapat memotong langsung kepada esensi situasi dan kondisi, (j) memahami kerangka masalah secara tepat, (k) melihat saling ketergantungan antara orang dan benda, (l) secara ekstrim toleran dan mau menerima, dan (n) seorang ahli dalam melakukan transendensi diri (Hanan & Otten, 1995, dalam Wibowo, 2002: 39).

PENUTUP

Konseling multikultural sebagai suatu profesi mensyaratkan pengembannya menguasai seperangkat kompetensi multicultural, sikap, dan nilai, ciri-ciri kepribadian tertentu yang harus diinternalisasikan sebagai suatu keutuhan, dan secara konsisten diwujudkan dalam cara berpikir dan





bertindak yang akan menjadi instrument untuk mempengaruhi perkembangan dan perubahan perilaku klien yang akan dilayaninya. Cara berpikir dan bertindak konselor multicultural dibingkai dalam kerangka kerja system untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi layanan bantuan secara profesional dalam budaya Indonesia.

Akhirnya, melalui uraian ini akan lebih membuka wawasan bagi konselor di sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan konseling di Indonesia yang lebih terfokus pada latar budaya bangsa Indonesia yang multikultural yang sedang menjalani tugas-tugas perkembangan dan tahap tahap perkembangan menuju perkembangan yang optimal dan mandiri.

PUSTAKA

- Augsburger, D.W. (1986). *Pastoral counseling across cultures*. Philadelphia: The Westminster Press
- American Psychological Association. (2003). Guidelines on multicultural education, training, research, practice, and organizational change for psychologists. *American Psychologist*, 58, 377–402
- American School Counselor Association. (2005). *American School Counselor Association national model: A framework for school counseling programs* (2nd ed.). Alexandria, VA: Author
- Arredondo, P. & Perez, P. 2003. Expanding multicultural competence through social justice leadership. *The Counseling Psychologist* 31 (3), 282–289.
- Association for Specialists in Group Work. (2007). Group counseling in school: Special issue. *Journal for Specialists in Group Work*, 32(2).
- Banks, J. A. (2002). *An introduction to multicultural education* (3rd ed.). Needham, MA: Allyn & Bacon.
- Baich, S. P., Pieterse, A. L. & Bolden, M. A. 2004. Counseling psychology and social justice: Houston ... we have a problem. *The Counseling Psychology* 32 (1), 89–98.
- Buher, R. (2008). *Building cultural intelligence (CQ): Nine megaskills*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education
- Carrwright, B. Y., Daniels, J., & Zhang, S. (2008). Assessing multicultural competence: Perceived versus demonstrated performance. *Journal of Counseling and Development*, 8, 318–322.
- Darguns, J.G. (1986). 'Counseling Across Cultures: Common Themes and Distinct Approaches' Dalam Pedersen, P.B. et.al., Eds
- Epstein, R. M., & Hundert, E. M. (2002). Defining and assessing professional competence. *Journal of the American Medical Association*, 287, 226–235.
- Field, B.T. (2015). *40 Techniques Every Counselor Should Know*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
- Gilson, R. L. & Mitchell M.H (2010). *Introduction to Counseling and Guidance*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Johnson-McCoy, C. (2007). *School counseling to close the achievement gap: A social justice framework for success*. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
- Kuenington, S.P. (2001). *Benturan Antar-Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. (Alih bahasa oleh M.S. adat Ismail). Yogyakarta: Qalam. (1978).
- Johnson, L. S. (1995). Enhancing multicultural reactions: Intervention strategies for the school counselor. *The School Counselor*, 43(2), 103–113.
- Khaliz, M. B., & Canter, A. (2006). Culturally competent assessment and consultation. *Principal Leadership*, April, 2006, p. 11–15
- Lee, C. (2001). Culturally responsive school counselors and programs: Addressing the needs of all students. *Professional School Counseling*, 4(4), 257–261.
- Lee, J. A., & Arnold, M. S. (1998). From multiculturalism to social action. In C. C. Lee & G. R. Walz (Eds.), *Social action: A mandate for counselors* (pp. 51–64). Alexandria, VA:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau

2. Dilarang menguraikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



American Counseling Association and Educational Resources Information Center Counseling and Student Services Clearinghouse.

- Nelson, J., Bustamante, R., Wilson, E., & Onwuegbuzie, A. (2008). The schoolwide cultural competence observation checklist for school counselors: An exploratory factor analysis. *Professional School Counseling*, 11(4), 207–217
- Ott, J. (2014). Counseling theories: Traditional and alternative approaches. Dalam D.G.Hays & B.T.Erford (eds.). *Developing multicultural counseling competency: A systems approach* (p.476-98).Columbus,OH:Pearson Merrill Prentice Hall
- Owen, J.J., Tao, K., Leach, M.M. & Rodolfa, E. (2011). Clients perceptions of their psychotherapists multicultural orientation. *Psychotherapy*, 48, 274-282.
- Pedersen, P.B., ed. (1986). *Counseling Across Cultures*. Hawaaii: East- West Center.
- Ramirez, M.III (1991). *Psychoterapy and Counseling with Minorities: A Cognitive Approach to Individual and Cultural Differences*. Oxford: Pargamon Press.
- Rodolfa, E., Bent, R., Eisman, E., Nelson, P., Rehm, L., & Ritchie, P. L. (2005). A cube model for competency development: Implications for psychology educators and regulators. *Professional Psychology: Research and Practice*, 36(4), 347–354.
- Rubin, N. J., Bebeau, M., Leigh, I. W., Lichtenberg, J. W., Nelson, P. D., Portnoy, S., et al. (2007). The competency movement within psychology: An historical perspective. *Professional Psychology: Research and Practice*, 38, 452–462
- Sue, D. W., & Sue, D. (1999). *Counseling the culturally different: Theory and practice*. (3rd ed.). New York: Wiley
- Sue, D. W. (2001). Multidimensional facets of cultural competence. *The Counseling Psychologist*, 29, 790–821
- Sue, D. W., & Sue, D. (2002). *Counseling the culturally diverse*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Sue, D.W. (1992). The challenge of multiculturalism: The road less traveled. *American Counselor*. 1. 6–14.
- Sue, D. W., Arredondo, P., & Mc Davis, R. J. (1992). Multicultural counseling competencies and standards: A call to the profession. *Journal of Counseling and Development*, 70, 447 –483.
- Sue, D. W., & Torino, G. C. (2005). Racial-cultural competences: Awareness, knowledge and skills. In Carter, R. T. (Ed.), *Handbook of racial- cultural psychology and counseling: theory and research* (pp. 3–18). Hoboken, NJ: Wiley.
- Sue, D. W., & Sue, D. (2008). *Counseling the culturally diverse: Theory and practice* (5th ed.). New York: Wiley.
- Van Esbroeck, R. & Watts, A.G. 1998. New skills for a holistic career guidance model. Internet International Careers Journal, June. [Http://www.careers-journal.com](http://www.careers-journal.com)
- Vasquez, M.J.T. (2010). Ethics in multicultural counseling practice. Dalam J.G. Ponterotto, J.M. Casas, L.A. Suzuki & C.M. Alexander (Penyunting), *Handbook of multicultural counseling* (127-145). Thousand Oaks, CA: Wiley.
- Wong, E. & Speight, S. L. 2003. Multicultural competence, social justice, and counseling psychology: Expanding our roles. *The Counseling Psychologist* 31 (3), 253–272
- Wong, Mungin Eddy (2002). *Konseling Perkembangan :Paradigma Baru dan Relevansinya di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Bimbingan dan Konseling pada FIP-UNNES tanggal 13 Juli 2002. Semarang: Depdiknas UNNES.
- Wong, Mungin Eddy (2015). Pemberdayaan dan Pembudayaan Manusia Indonesia Melalui Konseling Memasuki Masyarakat Ekonomi Asean. Seminar dan Workshop Internasional Konseling Malindo ke-4. Prosiding. 1-17. Bali: ABKIN, PERKAMA, JPA, IKIP PGRI BALI.

